



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/ 103 /KPTS/013/2022

TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018-2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lain melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil penilaian Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/729/KPTS/013/2021, perlu menetapkan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020;

Mengingat: . . .

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

KETIGA: . . .

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Februari 2022



KHOIRAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/ 103 /KPTS/013/2022

TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018-2020

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI	PREDIKAT
1	2	3	4
1	Kota Probolinggo	66,02	Perlu Perbaikan
2	Kota Mojokerto	65,40	Perlu Perbaikan
3	Kabupaten Banyuwangi	62,35	Perlu Perbaikan
4	Kabupaten Lumajang	60,89	Perlu Perbaikan
5	Kabupaten Tuban	58,59	Perlu Perbaikan
6	Kabupaten Lamongan	57,81	Perlu Perbaikan
7	Kota Blitar	56,20	Perlu Perbaikan
8	Kabupaten Madiun	55,49	Perlu Perbaikan
9	Kabupaten Magetan	54,66	Perlu Perbaikan
10	Kabupaten Sidoarjo	53,75	Perlu Perbaikan
11	Kota Surabaya	52,95	Perlu Perbaikan
12	Kota Madiun	52,50	Perlu Perbaikan
13	Kabupaten Trenggalek	52,37	Perlu Perbaikan
14	Kabupaten Pamekasan	51,28	Perlu Perbaikan
15	Kabupaten Malang	48,52	Perlu Perbaikan
16	Kabupaten Blitar	40,93	Perlu Perbaikan
17	Kota Kediri	38,15	Tidak ada Predikat karena tidak input Dimensi 5
18	Kota Malang	36,00	Perlu Perbaikan
19	Kabupaten Sumenep	31,17	Sangat Perlu Perbaikan

1	2	3	4
20	Kabupaten Jombang	27,60	Tidak ada Predikat karena tidak input Dimensi 5
21	Kabupaten Probolinggo	26,42	Input Dimensi 5, tetapi tidak ada Predikat
22	Kabupaten Mojokerto	23,89	Sangat Perlu Perbaikan
23	Kabupaten Tulungagung	16,01	Input Dimensi 5, tetapi tidak ada Predikat
24	Kabupaten Kediri	4,61	Tidak ada Predikat karena tidak input Dimensi 5
25	Kabupaten Bojonegoro	1,41	Sangat Perlu Perbaikan
26	Kabupaten Ponorogo	1,20	Sangat Perlu Perbaikan
27	Kabupaten Ngawi	Tidak ada nilai	Input Dimensi 5, tetapi tidak ada Predikat
28	Kabupaten Nganjuk	Tidak ada nilai	Input Dimensi 5, tetapi tidak ada Predikat
29	Kabupaten Pasuruan	Tidak ada nilai	Input Dimensi 3, 4, 5, 6, tetapi tidak ada Predikat
30	Kabupaten Sampang	Tidak ada nilai	Input Dimensi 3, tetapi tidak ada Predikat
31	Kabupaten Pacitan	Tidak ada nilai	Input Dimensi 5, tetapi tidak ada Predikat
32	Kabupaten Bondowoso	Tidak ada nilai	Tidak input Semua Dimensi Tahun 2018

2. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI	PREDIKAT
1	2	3	4
1	Kota Mojokerto	69,31	Baik
2	Kota Probolinggo	68,83	Baik
3	Kabupaten Pamekasan	65,92	Perlu Perbaikan
4	Kabupaten Magetan	64,55	Perlu Perbaikan
5	Kabupaten Lamongan	64,06	Perlu Perbaikan
6	Kota Madiun	62,21	Perlu Perbaikan

1	2	3	4
31	Kabupaten Bondowoso	Tidak ada nilai	Tidak input Semua Dimensi Tahun 2019
32	Kabupaten Bojonegoro	Tidak ada nilai	Input Dimensi 5, tetapi tidak ada Predikat

3. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI	PREDIKAT
1	2	3	4
1	Kabupaten Magetan	75,53	Baik
2	Kota Mojokerto	70,51	Perlu Perbaikan
3	Kota Blitar	69,01	Perlu Perbaikan
4	Kabupaten Banyuwangi	67,90	Perlu Perbaikan
5	Kabupaten Tuban	67,31	Perlu Perbaikan
6	Kabupaten Malang	67,09	Perlu Perbaikan
7	Kabupaten Lumajang	66,61	Perlu Perbaikan
8	Kabupaten Madiun	66,02	Perlu Perbaikan
9	Kota Madiun	64,92	Perlu Perbaikan
10	Kabupaten Lamongan	63,57	Perlu Perbaikan
11	Kabupaten Trenggalek	61,93	Perlu Perbaikan
12	Kota Probolinggo	61,05	Perlu Perbaikan
13	Kota Surabaya	58,70	Perlu Perbaikan
14	Kabupaten Sidoarjo	58,34	Perlu Perbaikan
15	Kabupaten Pamekasan	57,80	Perlu Perbaikan
16	Kabupaten Blitar	54,62	Perlu Perbaikan
17	Kabupaten Sumenep	53,44	Perlu Perbaikan
18	Kota Malang	51,88	Perlu Perbaikan
19	Kota Kediri	48,56	Tidak ada Predikat karena tidak input Dimensi 5
20	Kabupaten Jombang	37,51	Tidak ada Predikat karena tidak input Dimensi 5
21	Kabupaten Probolinggo	35,84	Sangat Perlu Perbaikan

1	2	3	4
7	Kabupaten Banyuwangi	61,92	Perlu Perbaikan
8	Kota Blitar	60,88	Perlu Perbaikan
9	Kabupaten Blitar	59,58	Perlu Perbaikan
10	Kabupaten Madiun	59,05	Perlu Perbaikan
11	Kabupaten Malang	57,95	Perlu Perbaikan
12	Kota Surabaya	57,42	Perlu Perbaikan
13	Kabupaten Lumajang	56,85	Perlu Perbaikan
14	Kabupaten Sidoarjo	54,09	Perlu Perbaikan
15	Kabupaten Tuban	52,48	Perlu Perbaikan
16	Kabupaten Trenggalek	50,81	Perlu Perbaikan
17	Kota Malang	40,61	Perlu Perbaikan
18	Kabupaten Sumenep	37,61	Perlu Perbaikan
19	Kota Kediri	34,15	Tidak ada Predikat karena tidak input Dimensi 5
20	Kabupaten Probolinggo	31,64	Tidak ada Predikat karena tidak input Dimensi 5
21	Kabupaten Mojokerto	27,53	Sangat Perlu Perbaikan
22	Kabupaten Pasuruan	26,30	Sangat Perlu Perbaikan
23	Kabupaten Sampang	11,69	Tidak ada Predikat karena tidak input Dimensi 5
24	Kabupaten Kediri	5,01	Tidak ada Predikat karena tidak input Dimensi 5
25	Kabupaten Ngawi	Tidak ada nilai	Input Dimensi 5, tetapi tidak ada Predikat
26	Kabupaten Nganjuk	Tidak ada nilai	Input Dimensi 5, tetapi tidak ada Predikat
27	Kabupaten Tulungagung	Tidak ada nilai	Input Dimensi 6, tetapi tidak ada Predikat
28	Kabupaten Jombang	Tidak ada nilai	Input Dimensi 2, 3, 4, tetapi tidak ada Predikat
29	Kabupaten Pacitan	Tidak ada nilai	Input Dimensi 5, tetapi tidak ada Predikat
30	Kabupaten Ponorogo	Tidak ada nilai	Input Dimensi 5, tetapi tidak ada Predikat

1	2	3	4
22	Kabupaten Mojokerto	32,58	Sangat Perlu Perbaikan
23	Kabupaten Sampang	25,45	Tidak ada Predikat karena tidak input Dimensi 5
24	Kabupaten Kediri	4,43	Tidak ada Predikat karena tidak input Dimensi 5
25	Kabupaten Pacitan	2,41	Sangat Perlu Perbaikan
26	Kabupaten Bondowoso	0,00	Tidak ada Predikat karena tidak input Dimensi 5
27	Kabupaten Ngawi	Tidak ada nilai	Input Dimensi 5, tetapi tidak ada Predikat
28	Kabupaten Nganjuk	Tidak ada nilai	Input Dimensi 5, tetapi tidak ada Predikat
29	Kabupaten Tulungagung	Tidak ada nilai	Input Dimensi 2, 4 sampai dengan 6, tetapi tidak ada Predikat
30	Kabupaten Pasuruan	Tidak ada nilai	Input Dimensi 3 sampai dengan 6, tetapi tidak ada Predikat
31	Kabupaten Ponorogo	Tidak ada nilai	Input Dimensi 5, tetapi tidak ada Predikat
32	Kabupaten Bojonegoro	Tidak ada nilai	Input Dimensi 5, tetapi tidak ada Predikat



GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth: 1. Menteri Dalam Negeri.

2. Inspektur Provinsi Jawa Timur.

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
